



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalfi Sopiatul Arpah*, Dindin Solahudin, Yuliani

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : dalfisofia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep dan strategi PKH, proses pemberdayaan melalui PKH, serta tingkat keberhasilan program. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dan strategi PKH di Desa Cipicung dilakukan melalui bantuan dana bagi keluarga kurang mampu disertai penyuluhan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program yang dijalankan meliputi pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan lansia. Dampak program terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, ditandai dengan peningkatan jumlah siswa sekolah serta kebiasaan pemeriksaan rutin di posyandu. Selain itu, program ekonomi membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Kata Kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

This study aims to identify the concept and strategy of the PKH program, the empowerment process, and the level of program success. The research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed to draw conclusions.

The findings show that the PKH program in Cipicung Village is implemented by providing financial assistance to underprivileged families who meet the criteria, aiming to break the cycle of poverty. This is accompanied by counseling and guidance to improve community welfare. The empowerment process includes programs in health, education, economy, and elderly assistance. The results indicate that the program has increased awareness of the importance of education and health, as seen in regular health check-ups and higher school attendance rates. Furthermore, economic empowerment activities have contributed to increased family income.

Keywords : Empowerment; Community; Family Hope Program

PENDAHULUAN

Kesejahteraan menjadi hal utama yang paling disorot dan dilihat dalam kehidupan masyarakat, masyarakat dikatakan sejahtera apabila mereka mampu dalam memenuhi yang disebut sandang, pangan, papan atau lebih utamanya mereka mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, berada dalam ketenangan, kesenangan dan sehat sentosa, atau dalam kata lain masyarakat yang dikategorikan sejahtera adalah masyarakat yang bisa merasakan kemakmuran, tidak miskin, tidak merasakan kelaparan, mempunyai simpanan dana darurat dan tentunya dapat dengan mudah mengakses pendidikan dan kesehatan.

Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Sosial (permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 yaitu: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang berasal dari pemerintah dengan tujuan meringankan keluarga miskin agar sejahtera sehingga jumlah masyarakat miskin di Indonesia berkurang. Hal tersebut terbukti bahwa persentase masyarakat miskin pada Bulan Maret 2016 sebesar 10,86% dari jumlah penduduk 28,01 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016). Pemerintah memiliki target pada tahun 2019 dalam menurunkan angka kemiskinan sebanyak 7-8%, selaras dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Kementerian Sosial, 2021).

Latar belakang penelitian ini yaitu supaya dapat menganalisis dan mengidentifikasi yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dampak atau hasil pengimplementasian program PKH pada masyarakat di Desa Cipicung yang mana di lokasi tersebut masih terbilang banyak masyarakat yang belum sejahtera, masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan yang layak diberi uluran bantuan dan tentunya sangat relevan dengan target peserta penerima program manfaat PKH tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endah Kusumawati pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan di Desa Soko dari tahun 2013-2017 sudah terlaksana dengan baik juga sudah memenuhi indikator empat sasaran ,tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berguna dan berpengaruh terhadap kesuksesan, program namun program PKH tersebut belum bisa dikatakan merata karena masih ada beberapa warga yang tidak mampu yang belum merasakan manfaat dari program PKH tersebut hal ini

disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dari pemerintah Desa Soko dan juga banyaknya warga tidak mampu di Desa Soko (Kusumawati,2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yuliani M pada tahun 2020 dengan judul *Efektivitas Pengelolaan Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan program PKH di Ponorogo belum efektif karena untuk mengukur pencapaian tujuan dilihat dari aspek target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten ponorogo dilihat dari empat prinsip menurut manajemen islam yaitu prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan, prinsip tidak boros dan prinsip berlaku adil, dari prinsip di atas sudah terpenuhi tetapi satu yang belum yaitu prinsip tidak boros karena dana PKH kebanyakan malah dibelikan untuk kepentingan lain daripada memenuhi kebutuhan (Monika,2020).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anjela pada tahun 2019 dengan judul *Efektifitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* . Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektifitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang dapat disimpulkan efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil persentase rata-rata angket diperoleh dari penerima bantuan PKH mencapai 78,61% yang berada pada kategori efektif yaitu berarti berada pada posisi 61-80% sedangkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan sumber dana sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas program PKH tersebut dibilang efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Anjela,2019).

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pertanyaan penelitian yang *pertama* Bagaimana Konsep dan Strategi Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya?, *kedua* bagaimana pelaksanaan Program keluarga Harapan dan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya?, *ketiga* Bagaimana tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan Masyarakat di Desa Cipicung Kecamatan Culamega kabupaten Tasikmalaya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

LANDASAN TEORITIS

Konsep pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti “kekuatan” dan dalam Bahasa Inggris dari kata “*empowerment*” yang berarti memberikan daya atau kekuatan kepada golongan yang lemah dan belum mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama sandang, pangan, papan atau secara luasnya menjangkau pendidikan dan kesehatan (Hamid, 2018). Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat diartikan dengan suatu tindakan sosial masyarakat yang mengorganisasikan dirinya untuk ikut merencanakan dan bertindak menyelesaikan persoalan sosial atau memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009).

Pemberdayaan masyarakat adalah cara atau langkah nyata yang terencana, dengan melihat sisi kekurangan untuk diperbaiki dan melihat sisi potensi untuk dikembangkan. Pemberdayaan dilaksanakan karena suatu kondisi yang perlu diperbaiki atau diubah ke arah yang lebih baik. Secara teoritis pemberdayaan masyarakat dapat diartikan dengan perilaku sosial dari masyarakat suatu kelompok yang mengkoordinasikan diri dalam mengelola penyusunan dan tindakan bersama dengan keahlian dan sumber daya yang dikuasai (Sumodiningrat, 2009). Menurut Suharto (2005) yang dikutip oleh Dony Prasetyo dan Irwansyah berpendapat bahwa Pemberdayaan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, terutama yang belum sejahtera dalam keadaan yang belum mandiri, memiliki keahlian dan kebebasan dengan tidak dikendalikan oleh siapapun, maka secara tidak langsung masyarakat akan berusaha menutupi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok, termasuk kebebasan memberi pandangan maupun dari kemiskinan dan ketidaktahuan. Selanjutnya dapat menyentuh dan memiliki penghasilan dengan mendapatkan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri (Dony Prasetyo dan Irwansyah, 2020).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan dan kemampuan terhadap masyarakat yang tergolong lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini bisa disebabkan karena kondisi internal (diri mereka sendiri) atau kondisi eksternal (diperlakukan tidak adil dan ditindas oleh pihak yang berkuasa), yang mana harapan setelah diberdayakan, mereka lebih mampu dan mandiri bukan hanya dalam bidang ekonomi dan memenuhi kebutuhan, namun lebih luasnya mampu mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemecahan masalah lingkungan, hingga kemampuan dalam menentukan pilihan dalam politik (Hamid, 2018). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah merujuk kepada situasi atau nilai akhir yang diharapkan dari perubahan sosial yaitu terbentuknya masyarakat yang mandiri dalam mengelola potensi maupun menyelesaikan masalahnya, menguasai ilmu dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk kebutuhan lahiriah dan batiniah seperti mempunyai kepercayaan diri,

mampu menyampaikan pendapat, memiliki pekerjaan, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan diri sendiri mampu dalam menjalani kehidupannya (Widyanto, Hikmawan dan Riswanda, 2019).

Definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan:

Pertama Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung,

Kedua Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang dipengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial,

Ketiga Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan:

Pertama Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau menjadikan sebagian kekuatan, kekuasaan pada masyarakat bersangkutan agar lebih berdaya (*survival of the fittest*).

Kedua Menekankan pada proses stimulus, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan akan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” . *People centered* merupakan tatanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat. Konsep *people centered* ini relevan dengan ruh demokrasi yang juga mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan setiap harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Tentunya, proses tersebut akan sulit dilakukan tanpa cara-cara tertentu bahkan metodologi tertentu.

Oleh karena itu empowering menjadi mutlak dilakukan sebagai perangkat metode-metode yang dapat memudahkan masyarakat dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep *people centered*, *participatory* dan *empowering* itu diketahui, dipahami dan tersosialisasikan secara merata kepada masyarakat, maka dalam paradigma baru pembangunan juga mensyaratkan sustainability atau keberlanjutan proses

dalam setiap ruang dan waktu. Pada proses ini, masyarakat akan melakukan pembangunan melalui siklus program yang pada proses pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan tertentu yang dirancang secara sustainable. Pada kenyataan proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dan bahkan pada negara yang menganut atheisme akan mengembalikan pada nilai-nilai ketuhanan atau dalam konsep Islam disebut sebagai nilai-nilai ilahiyyah. Adapun goals atau tujuan pemberdayaan seringkali ditujukan untuk mengangkat orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Padahal lebih daripada itu, pemberdayaan bertujuan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dengan kata lain pemberdayaan adalah proses pendidikan secara terbuka dalam kehidupan bermasyarakat yang berujung pada upaya memanusiakan manusia. Adapun secara khusus, yang menjadi tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Adapun pengelompokan yang dapat dikategorikan

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihantolo dan Dwidjowijoto (2007) yang dikutip oleh Sururi dan Ahmad , diperlukan beberapa tahap setidaknya yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama* Penyadaran, pada tahap penyadaran terhadap masyarakat, tentunya masyarakat yang menjadi sasaran yaitu dengan diberitahu, disadarkan bahwa mereka pasti memiliki kelebihan dan potensi yang pasti bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. *Kedua* Pengkapasitasan, pada tahap pengkapasitasan ini, apabila masyarakat sudah mumpuni dalam menerima daya atau *Capacity Building* yang didalamnya yaitu terdapat komponen manusia, organisasi, struktur dan memiliki nilai serta pengadaan. *Ketiga* Pemberian Daya, pada tahap pemberian daya ini yang didalamnya masyarakat distimulasi diberikan daya, kewenangan dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, pemberian daya disesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan atau kualitas masing-masing individu. Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat melibatkan dua komponen, yaitu masyarakat sebagai objek yang diberdayakan dan pihak lain sebagai pemberdaya yaitu pemerintah desa/daerah atau lembaga swadaya yang peduli pada keberlanjutan pemberdayaan (Sururi dan Ahmad, 2019).

Hal berikut merupakan indikator kesejahteraan dalam hal pendidikan menurut Widiyanto (2019) diantaranya: *Pertama* Kesadaran pentingnya pendidikan, masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan amat penting pada saat ini, melihat persaingan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, maka generasi-generasi perlu dipupuk keahliannya, salah satunya dalam dunia pendidikan, untuk mengimbangi kelompok-kelompok masyarakat yang cerdas dan berdaya. Maka dari itu kesadaran pentingnya pendidikan akan menjadikan para orangtua berusaha memasukan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang menurut mereka baik, yang mana dampak kedepannya akan

melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berdaya. *Kedua* Ketersediaan lembaga pendidikan, ketika masyarakat telah menyadari pentingnya pendidikan dan berniat memberikan pendidikan yang baik untuk generasinya maka lembaga pendidikan pun harus tersedia disekitar, baik itu sekolah menengah, perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya, sehingga kesadaran tersebut akan tersalurkan dengan baik dan secara terus menerus ilmu pengetahuan didapatkan dengan mudah oleh masyarakat.

Ketiga Kemampuan dalam biaya, masyarakat yang sadar pentingnya pendidikan, kemudian lembaga pendidikan tersebut tersedia disekitar dan mudah dijangkau tidak akan terealisasikan jika masyarakatnya tidak memiliki biaya untuk pendidikan, maka dari itu faktor biaya sangat penting baik itu yang keluar dari pribadi ataupun dibantu dengan beberapa program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah. *Keempat* Kualitas pendidikan yang baik, dalam menciptakan generasi-generasi yang cerdas, mandiri dan berdaya, maka diperlukan tenaga pendidik yang berkualitas pula agar ilmu yang diberikan senantiasa mengimbangi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pada saat ini dan kedepannya, selain itu fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, alat elektronik yang memadai untuk dijadikan media pembelajaran yang maksimal, sehingga memudahkan dalam menerima berbagai ilmu dan praktek. *Kelima* Keberlanjutan, Keberlanjutan dalam hal ini yaitu ilmu yang didapatkan sekarang hendaknya dapat dimanfaatkan pula untuk beberapa tahun kedepan, ilmu pengetahuan yang bisa dipakai dan diaplikasikan secara berkelanjutan dalam jangka waktu lama bukan hanya pada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Desa Cipicung yang berada diantara pegunungan dan perbukitan, dan karena jarak yang jauh dari perkotaan, membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai fasilitas, seperti sekolah, puskesmas, pasar, sehingga masyarakat memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan dalam mencari pekerjaan membuat masyarakat kebanyakan hanya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, sebagiannya lagi memilih untuk pergi mengadu nasib ke ibu kota sebagai pedagang.

Kondisi wilayah tersebut sebenarnya berpotensi bagus dan menghasilkan apabila dikelola dengan baik dan terorganisasi, luasnya perkebunan dan jenis tanah yang subur mampu menghasilkan sayuran yang berkualitas dan melimpah yang bisa dijual ke pasar dan luar kota. Pemerintah wilayah Desa Cipicung terus bersinergi membantu masyarakat untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah juga sudah mulai berbenah dalam hal sarana prasarana seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi yang mulai rusak sudah duluhan diperbaiki. Selain itu, mengingat kondisi masyarakat yang lulusan pendidikan umum masih berjumlah sedikit, kebanyakan masyarakat hanya lulusan SD dan

SMP menandakan perlu adanya dorongan dan dukungan dari segi biaya dan pemikiran agar masyarakat bisa berubah kearah yang lebih baik. Maka dari itu hadirnya PKH diharapkan dapat menciptakan perubahan di masyarakat dimulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu terutama ibu hamil anak dan lansia agar tercapainya fasilitas kesehatan dan pendidikan disekitar, selain itu manfaat PKH juga dihadirkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjunjung taraf kesejahteraan sesuai dengan amanat Konstitusi dan Nawacita Presiden RI, dan sangat diharapkan dengan kehadiran dan pelaksanaan program PKH ini dapat membantu mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraan tersebut.

Penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem perbankan secara non tunai. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai akses untuk transaksi non tunai, kartu tersebut sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan agar mendapatkan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang terhubung dengan rekening tabungan. Nomor rekening tabungan akan diperoleh setiap keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan dalam mengakses jasa keuangan (*financial inclusion*). Untuk sistem penarikan dana bantuan dilakukan secara berjenjang yaitu dalam periode satu tahun terdapat empat kali penarikan dengan tujuan mengedukasi keluarga yang mendapatkan manfaat untuk menabung dan manajemen keuangan dengan baik. Dipandang dari perspektif negatif, jika dana bantuan Program Keluarga Harapan tidak dialokasikan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat maka kehidupan tetap statis dalam kemiskinan karena tidak dimaksimalkan untuk memberdayakan keluarga

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada masyarakat yang menjadi penerima PKH, selama kurang lebih tujuh tahun PKH berjalan, empat tahun kebelakang ini pemerintah memprediksi terjadinya kenaikan sebesar 43% dari jumlah keseluruhan program yang telah berjalan, perubahan ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang sudah beranjak peduli dengan kesehatan seperti memeriksakan kandungan dan balita ke posyandu, jumlah siswa yang bersekolah semakin tahun terus meningkat, mata pencarian warga bertambah.

Konsep dan Strategi Program Keluarga Harapan

Konsep pemberdayaan masyarakat melalui PKH Di Desa Cipicung adalah untuk menggerakkan kesejahteraan di berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan dana bantuan kemudian masyarakat ditarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang diadakan.

Strategi pemberdayaan masyarakat Desa Cipicung melalui Program Keluarga Harapan adalah dengan dilakukannya pemberian dana bantuan kepada

masyarakat kurang mampu (keluarga penerima manfaat) dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima PKH. Selain pemberian dana bantuan, masyarakat penerima PKH juga diberikan pengarahan dan bimbingan dalam melaksanakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan

Pendamping dan pemerintah membagi pemberdayaan kedalam tiga kategori, kategori aras mikro, aras mezzo dan massal, *pertama* kategori aras mikro yaitu pemberian dana bantuan kepada individu atau keluarga penerima manfaat, selain itu pendamping memberikan arahan kepada masing-masing keluarga, terkait tujuan diberikannya dana tersebut, selain untuk penunjang kebutuhan ekonomi, dana bantuan tersebut juga untuk kepentingan pendidikan, seperti untuk memenuhi keperluan sekolah anak-anaknya, yang mana jika si anak memerlukan sejumlah biaya sekolah yang perlu dibayar, hendaknya dana tersebut dialokasikan ke sekolah.

Kategori *kedua* yaitu Aras Mezzo atau kelompok, dalam hal ini, pendamping mengkategorikan pemberdayaan sesuai minat dan keahlian dari masyarakat, ada kelompok yang mengembangkan perkebunan di bidang sayuran, ada kelompok yang mengembangkan di bidang olahan dan kerajinan sesuai minat dan keahlian yang masyarakat miliki. Pada kelompok kategori perkebunan dan sayuran, pendamping mengarahkan supaya pengelolaannya dilaksanakan secara sistematis, isinya berbagai macam jenis, diantaranya, teh, cabai, sawi, terong, daun bawang, engkol, timun, kacang panjang, buncis, tomat dan sayuran lain yang sekiranya cocok ditanam di kondisi tanah Desa Cipicung. Kelompok kategori perkebunan dan sayuran ini biasanya dikelola oleh orang-orang yang rumahnya berdekatan dan sesama keluarga penerima PKH. Selain kelompok pertanian ada juga kelompok olahan makanan dan cemilan, isinya didominasi oleh para ibu rumah tangga, jenis yang dihasilkan juga beragam, seperti dianjurkan membuka kios kecil-kecilan, olahan manisan terong, berbagai olahan keripik atau kue yang bisa dijadikan cemilan atau oleh-oleh khas Desa Cipicung. Namun pemberdayaan kelompok ini realitanya banyak terjadi pasang surut pada pelaksanaan di lapangan, banyak sekali kendala baik itu internal maupun eksternal, misalnya dalam kelompok kategori perkebunan, didalam anggota kelompoknya seringkali terjadi sifat saling mengandalkan satu sama lain, terutama yang paling sering terjadi adalah masalah modal, karena setiap pengolahan atau produksi memerlukan jumlah modal yang cukup besar, terhitung seperti modal, pengelolaan kebunnya, pupuk dan juga peralatan lain yang diperlukan. Selain masalah modal, hambatan lainnya yaitu terdapat pada sifat masyarakat yang harus selalu diperintah dan komando dalam memulai pengelolaan kebunnya, masyarakat belum mempunyai sikap inisiatif dalam pengurusannya, harus selalu dipantau dan diperintah oleh pendamping. Uraian di atas ada kaitannya dengan pendapat tahapan

pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mendukung masyarakat setempat dalam merencanakan, mengambil keputusan dan mengolah sumber daya serta kemampuan yang dimiliki terutama dalam pengembangan ekonomi, lingkungan dan sosial (Subejo dan Narimo, 2004).

Kategori *ketiga* yaitu Aras Makro atau masal, Proses pemberdayaan Makro (masal) di Desa Cipicung belum banyak kegiatan atau belum banyak dilaksanakan, selama ini yang baru dilaksanakan oleh pendamping dan masyarakat penerima PKH adalah rutin mengadakan kumpulan atau rapat *sharing* terkait perkembangan masyarakat penerima PKH, didalamnya membahas tentang pembaruan-pembaruan peraturan penerima PKH, perkembangan balita dan ibu hamil, diskusi tentang permasalahan-permasalahan dalam mengelola usaha, diskusi tentang kemana saja dana PKH tersebut digunakannya, pendamping menekankan supaya dana bantuan digunakan untuk kepentingan yang baik sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Kumpulan atau rapat ini dilaksanakan setiap satu atau dua bulan sekali sesuai kepentingan atau menjelang waktu pencairan dengan mengumpulkan seluruh masyarakat penerima untuk hadir, kumpulan ini bertempat di rumah atau di madrasah secara berkelompok atau menyesuaikan dengan wilayah RW. ada kaitannya dengan pendapat Paul bahwasannya Pemberdayaan ialah pembagian kewenangan yang adil sehingga mampu mendorong kesadaran politis dan kewenangan terhadap golongan yang lemah serta meningkatkan pengaruh mereka dalam proses dan hasil dari suatu pembangunan (Paul, 1987).

Keempat yaitu melaksanakan pendampingan bagi masyarakat penerima PKH Pendampingan PKH di Desa Cipicung baru hanya sebatas mendampingi program, agar program tersebut bisa diterapkan sesuai dengan peraturan dengan tidak melupakan kewajiban sebagai masyarakat penerima PKH, seperti misalnya bantuan tersebut diperuntukan kesehatan maka semestinya dana tersebut digunakan untuk kesehatan, yang tadinya ditujukan untuk pendidikan maka seharusnya digunakan untuk pendidikan juga. Jadi, sebagai pendamping tidak secara langsung mengawasi dalam hal penggunaan dana bantuan tersebut, hanya dari segi pengawasannya atau apabila ada masyarakat yang menyalahgunakan dana tersebut pihak pendamping akan menegur dan mengingatkan. Pendampingan kepada masyarakat ada yang disebut program P2K2 (Pendampingan, pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga) yang biasa dilakukan di setiap kelompok KPM yang didalamnya ada modul tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, yang mana didalamnya diberikan dukungan, penjelasan mengenai tujuan PKH agar dana yang diterima dikelola dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan uraian di atas ada kaitannya dengan pendapat Sumodiningrat bahwasannya masyarakat membutuhkan empati yang dilaksanakan oleh pihak lain yang telah lebih dulu maju dengan kelompok yang belum berkembang (Sumodiningrat, 1999).

Dari pendekatan strategi mikro, mezzo maupun makro, ketiganya dilakukan sebagai tahapan pemberdayaan dari lingkup yang kecil dan bisa dilakukan secara personal sampai pada ruang lingkup yang lebih luas sasaran dari

pemberdayaan adalah seluruh masyarakat dengan memprioritaskan pemberdayaan pada masyarakat tertindas yang lemah (kaum mustadz'afiin). Korelasi yang dapat diwujudkan adalah pada syarat-syarat pemberdayaan yang mengharuskan partisipasi dan kental dengan suasana demokrasi. Pada masyarakat demokratis akan menghasilkan tekanan secara bottom-up dari kaum mustadz'afiin yang tentunya secara kuantitas lebih banyak daripada kelompok pemerintahan yang pada suasana kemiskinan dipandang kelompok orang-orang kaya yang zalim (kaum muthrafiin)(Asep Iwan Setiawan,2012).

Pihak yang telah lebih dulu berkembang adalah seperti pemerintah, pendamping yang melakukan empati kepada masyarakat yang belum berkembang. Dalam konteks dakwah, pemberdayaan disebut sebagai tamkiin al-Dakwah yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kepedulian dan kemauan yang keras. Arah pemberdayaan diharapkan tepat pada sasaran yang dimulai dari kemiskinan dan simbol-simbol ketidakberdayaan lainnya. Sasaran pemberdayaan dilihat dari segi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu: 1) Kemiskinan, yaitu penduduk Indonesia yang termasuk kategori fakir miskin, 2) Keterlantaran, yaitu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang melanda anak-anak, perempuan dan lanjut usia, gelandangan dan pengemis, Kecacatan baik cacat secara fisik maupun cacat secara mental, 4) Ketuna-sosial, yaitu kondisi disharmonisasi dengan nilai susila dan sosial budaya yang umum berlaku di masyarakat, 5) Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial (Asep Iwan Setiawan, 2012).

Bagi masyarakat Islam proses pemberdayaan secara eksplisit dan implisit pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ketika hijrah dari Hijaz (Makkah) ke Yatsrib (Madinah). Wujud pemberdayaan masyarakat Madinah dapat dilihat dari gerakan dakwah Nabi Muhammad Saw secara bil hal atau dakwah melalui tindakan nyata dalam memfasilitasi masyarakat Yatsrib dalam mewujudkan harapan-harapannya saat itu, Bagi masyarakat Islam proses pemberdayaan secara eksplisit dan implisit pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ketika hijrah dari Hijaz (Makkah) ke Yatsrib (Madinah). Wujud pemberdayaan masyarakat Madinah dapat dilihat dari gerakan dakwah Nabi Muhammad Saw secara bil hal atau dakwah melalui tindakan nyata dalam memfasilitasi masyarakat Yatsrib dalam mewujudkan harapan-harapannya saat itu, Dalam perspektif dakwah Islam, pemberdayaan disebut sebagai tamkiin al-Dakwah yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, mediasi dan mengedukasi masyarakat baik yang kaya (aghniya) maupun yang miskin (fuqoro wa al-masakiin) untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan umat (wahdat al-ummah) dalam perbedaan status sosial dan *income poverty*. Dalam perspektif Islam, manusia dalam kehidupannya mempunyai dua segi yang berlain-lainan:Pertama, ia tunduk kepada

undang-undang fitrah dan mematuhi karena nalurinya. Kedua, ia telah dikaruniai akal, daya untuk memahami, memperhatikan dan menentukan pendapat. Maka ia dapat menerima sesuatu dan menolak yang lain, menyukai sesuatu jalan dan membenci yang lain dan menciptakan dari dirinya sendiri sesuatu kaedah untuk berbagai-bagai segi kehidupan atau menerima suatu sistem kehidupan yang diciptakan oleh orang lain. Jadi ia tidak terikat oleh dunia ini, tetapi ia telah diberi kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan menentukan pilihannya mengenai pendirian dan perbuatannya.

Hasil Program Keluarga Harapan di Desa Cipicung

Hasil yang *pertama* yaitu peningkatan kepedulian terhadap kesehatan, dimulai dari hal dasar seperti posyandu yang mencerminkan bahwa sebagai orangtua perlu memperhatikan asupan gizi, pola hidup yang sehat juga perkembangan anaknya sejak dari balita, agar jika terjadi kelainan dalam pertumbuhan bisa terdeteksi sejak dini oleh orangtua dan bisa berkonsultasi dengan nakes terdekat untuk mengatasinya. Keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan merupakan salah satu tujuan pemberdayaan, karena salah ciri sebuah masyarakat sejahtera adalah ditandai dengan kualitas kesehatan yang baik dan tentunya pencapaian tersebut harus didasarkan dengan kesadaran masyarakat dan kemampuan dalam memperoleh akses kesehatan di lingkungan. Hal ini berkaitan dengan penjelasan mengenai indikator kesejahteraan Keterjangkauan yang berarti masyarakat ketika sudah sadar untuk memeriksakan kesehatannya dengan rutin, maka tempat untuk memeriksakannya pun harus terjangkau, lokasinya dekat dengan pemukiman warga, akses jalannya mudah ditempuh, maupun transportasinya tersedia ketika hendak ke klinik atau puskesmas. Usia balita merupakan masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak dimana kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi dengan baik. Di Indonesia saat ini masih banyak balita yang tergolong stunting. Anak balita dengan status stunting memiliki resiko tingkat kecerdasannya 5 sampai 10 poin cenderung rendah dibandingkan anak normal. Pemenuhan nutrisi yang kurang pada balita merupakan salah satu penyebab dari kejadian stunting. Pada balita masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya nafsu makan. Kenyataan yang sering dilakukan orang tua apabila anak tidak nafsu makan adalah pemberian multivitamin dimana mereka tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Manusia yang berkualitas dapat terbentuk salah satunya dengan cara pemenuhan akan zat gizi sesuai dengan fase tumbuh kembangnya. Kebutuhan akan nutrisi pada seorang balita harus benar-benar dipastikan terpenuhi mengingat usia ini adalah usia emas untuk perkembangan otak seorang anak. Tidak hanya perkembangan dari otak, perkembangan pada usia ini juga menentukan perkembangan secara fisik dan mental tahapan perkembangan berikutnya. Sehingga kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi dalam artian terpenuhi baik secara jumlah maupun kualitas dari makanannya. (Munjinah, 2015).

Berdasarkan hasil perhitungan pendamping PKH terkait jumlah peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan terkhusus bagi ibu dan balita, terjadi peningkatan sebesar 35% selama empat tahun terakhir, hal tersebut menandakan terjadi kenaikan pada tingkat kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu memeriksakan kandungan dan balita. kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Keberhasilan yang *kedua* yaitu peningkatan kepedulian terhadap pendidikan, pendidikan juga menjadi hak setiap warga untuk mendapatkannya, tidak terkecuali bagi masyarakat yang kurang mampu, PKH tentunya hadir untuk menolong permasalahan masyarakat terkait kekurangan biaya untuk sekolah bagi keluarga kurang mampu. Selain menjadi wadah untuk menambah wawasan, melalui pendidikan juga dapat mengasah kemampuan dalam mengatasi permasalahan, memperbaiki perekonomian, menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, kemudian dapat membina segala aspek kehidupan dengan memperbaiki pola pemikiran dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik, mampu mengubah dan membina karakter dan perilaku seseorang sebagai akibatnya mampu membedakan mana hal baik dan benar. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan memang yang diharapkan dari sebuah keberhasilan pemberdayaan, masyarakat yang memiliki pengetahuan tentunya akan bisa menghadapi kehidupan di masa depan dengan lebih baik, dengan memiliki pengetahuan, Hal ini berdasarkan dengan indikator kesejahteraan dalam hal pendidikan yaitu masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan amat penting pada saat ini, melihat persaingan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, maka generasi-generasi perlu dipupuk keahliannya, salah satunya dalam dunia pendidikan, untuk mengimbangi kelompok-kelompok masyarakat yang cerdas dan berdaya. Secara umum, tujuan proses pendidikan adalah meningkatkan kompetensi sebagai bauran pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang (Sailah, 2007), sehingga diharapkan setiap peserta didik dapat menjadi manusia terdidik baik dari segi *hard skill* maupun *soft skills*. Betapa mutlak dan pentingnya manusia yang berkarakter telah menjadi perhatian para pemimpin bangsa dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Presiden Sukarno sudah sejak awal kemerdekaan mencanangkan program *Nation And Character Building*. Manusia haruslah berkarakter menjadi makhluk akal budi yang berjiwa besar, tahan uji, matang, baik secara emosional maupun spiritual, di samping menekuni ilmu yang dipelajari (*Hard Skill*). Belajar merupakan proses yang kompleks dan unik, artinya seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya baik fisik maupun mental (Degeng, 1997). Keterlibatan dari semua aspek kepribadian ini akan tampak dari perilaku belajar orang itu. Perilaku belajar yang tampak adalah unik. Dikatakan demikian karena perilaku tersebut hanya terjadi pada orang itu

dan tidak pada orang lain, sehingga tiap orang akan memunculkan perilaku belajar yang berbeda. Gagne (1985) menyatakan bahwa belajar merupakan perangkat kegiatan yang komplek dalam merubah memori mahasiswa dari satu keadaan ke keadaan yang lain sebagai hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, mahasiswa akan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai.

Berdasarkan perhitungan pemerintah desa dan pendamping PKH Desa Cipicung terhadap perkembangan tingkat kesadaran masyarakat kepada pendidikan menunjukkan angka sebesar 63% yang menunjukkan hasil bahwa adanya PKH sangat berpengaruh besar kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Perspektif pendidikan, pembangunan sumber daya manusia adalah membantu masyarakat dan warga belajar menumbuhkan, mengembangkan kemampuan serta peranan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat dan umat Tuhan (Pidarta, 1997: 11). Hal tersebut sesuai dengan salah satu indikator kesejahteraan bahwa masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan amat penting pada saat ini, melihat persaingan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, maka generasi-generasi perlu dipupuk keahliannya, salah satunya dalam dunia pendidikan, untuk mengimbangi kelompok-kelompok masyarakat yang cerdas dan berdaya. Maka dari itu kesadaran pentingnya pendidikan akan menjadikan para orangtua berusaha memasukan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang menurut mereka baik, yang mana dampak kedepannya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berdaya. Selain itu faktor keberlanjutan juga diperlukan

Keberhasilan yang *ketiga* yaitu membantu mendorong kesejahteraan Sejak dari awal tujuan adanya program bantuan bersyarat PKH adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan memberikan bantuan langsung tunai, selain itu beberapa program pemberdayaan juga telah diusahakan agar berjalan dan dapat mendorong roda perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Desa Cipicung, seperti program agar membuat warung kecil-kecilan, program penjualan hasil olahan dan tani, harapannya dengan berbagai kegiatan tersebut masyarakat menjadi mandiri dan berdaya dalam memajukan perekonomian keluarga dan lingkungan. Beberapa program seperti pengolahan pertanian dan penjualan hasil olahan membuat sebagian masyarakat memiliki kesibukan baru sebagai mata pencarian tambahan di keluarganya, bertambahnya penghasilan masyarakat dari penjualan hasil tani dan olahan menjadi penunjang biaya hidup sehari-hari, harapannya, usaha tersebut terus berjalan dan berkembang supaya bisa menambah lapangan pekerjaan yang lebih luas di lingkungan selain masyarakat penerima PKH. Penjelasan di atas ada kaitannya dengan pendapat Wrihantolo dan Dwijojowito bahwasannya dalam proses pemberdayaan masyarakat melibatkan dua komponen, yaitu masyarakat sebagai objek yang diberdayakan dan pihak lain sebagai pemberdaya yaitu pemerintah desa/daerah atau lembaga swadaya yang peduli pada keberlanjutan pemberdayaan (Wrihantolo dan Dwijowijoto, 2007). Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh dari pendamping PKH Desa

Cipicung yang menunjukkan angka sebesar 32% selama empat tahun terakhir, hal ini menunjukkan peningkatan yang lumayan besar meskipun tidak setinggi nilai pada poin-poin di atas, namun hal ini cukup menjelaskan bahwa adanya PKH senantiasa menggerakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Cipicung.

Kemudian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk nyata dalam mendorong dan mentransformasikan laju pertumbuhan kualitas perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kepentingan di dalam masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Pemberdayaan masyarakat memiliki arti meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sejatinya bukan hanya sekedar mementingkan kepentingan dan pengetahuan individu saja tetapi harus lebih mementingkan kepada kepentingan kolektif berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dengan memberdayakan masyarakat Desa serta lebih mengoptimalkan potensi dan sumberdaya

Pemberdayaan atau lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia, merupakan upaya untuk memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat. Ini berarti memungkinkan orang untuk melihat dan memilih apa yang bermanfaat bagi mereka. Kegiatan pengembangan masyarakat Islam terdiri atas kegiatan utama berupa pentransformasi dan pelembagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam (Safei,dkk, 2020). Dengan demikian pemberdayaan sebagai Fenomena empirik yang selama ini dilakukan oleh para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO) akan dilihat dari sudut pandang teori-teori Dakwah yang diturunkan dari al-Quran dan Sunnah. Pada konteks ini pemberdayaan dimungkinkan dekat dengan teori tamkiin al-Islam yaitu sebagai proses pemberdayaan individu dan komunitas muslim dalam mengimplementasikan syariat Islam. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Konsep mengenai kekuasaan merupakan ide utama dalam hal pemberdayaan. Kekuasaan sendiri selalu diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Adanya kerja sama yang saling berkesinambungan dan melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga proses *empowerment* bisa berjalan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan—atau setidaknya diserupakannya—with istilah pengembangan. Konsepsi pengembangan sebagai pemberdayaan didasarkan pada penguatan kualitatif yang dilakukan fasilitator kepada kelompok atau komunitas masyarakat.

Segel dan Bruzy (dalam Kusnadi, 2013: 8) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Midgley

(dalam Sutomo, 2006: 12) memperjelas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dalam kaitan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal menuju masyarakat madani. Dalam pemberdayaan ini, terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan, yaitu: tahap inisiasi, tahap partisipasi, dan tahap emansipasi (Suryono, 2013: 147).

PENUTUP

Adapun hasil dari beberapa program yang bersumber dari PKH diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama* Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan. PKH hadir ditengah masyarakat dengan meningkatkan kesadarnya terhadap masalah kesehatan, adanya Posyandu mendorong masyarakat untuk memeriksakan bayi dan balitanya secara rutin, selain itu masyarakat menjadi lebih memperhatikan pola hidup sehat dan asupan gizi keluarganya. *Kedua* Peningkatan Kepedulian Terhadap Pendidikan, dengan adanya PKH dan masyarakat terdata sebagai penerima manfaat, menjadikan alasan dirinya sadar terhadap pentingnya pendidikan. Masyarakat yang awalnya kesulitan dalam hal biaya pendidikan setelah mendapat PKH menjadi sedikit terbantu dan ikut memantau perkembangan pendidikan anak-anaknya. *Ketiga* Membantu Mendorong Kesejahteraan, dengan dilaksanakannya program membuka kios, pengelolaan sayuran dan pengolahan makanan, masyarakat memiliki mata pencarian tambahan, meskipun belum banyak tetapi dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun pemberdayaan ini tidak semua berjalan mulus, dalam hal kesehatan masyarakat seringkali enggan berangkat ke posyandu karena beranggapan akan dimintai sejumlah biaya, padahal Posyandu dilaksanakan secara gratis. Dalam program ekonomi kelompok terdapat kendala dalam pelaksanaanya, seperti kurangnya modal, masyarakat memiliki sifat saling mengandalkan, dan belum adanya inisiatif dalam mengelola perkebunan tersebut. Pemberdayaan yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berhasil, namun dengan adanya beberapa program yang telah dilaksanakan masyarakat mulai lebih menyadari pentingnya kesehatan, pendidikan, dan memiliki penghasilan tambahan.

Harapannya semoga dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan baik pemerintah, pendampingan maupun masyarakat hendaknya memanfaatkan adanya program tersebut dengan menggunakan dana

bantuan sebaik mungkin dan sama-sama berusaha mensukseskan program yang dibangun untuk mendorong kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sulistyawati , S. R. (2022). Pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera Melalui Program Keluarga Harapan. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 399. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/20395>
- Ahmad Dhani Effendi, R. A. (2014). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate. *Jurnal Sains dan Teknologi*. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/67aaf5d08b007fb66a3f4516a8e40650.pdf>
- Anjela, R. (2019). Efektifitas Bantuan Dana Tunai Program Keluarga Harapan Pkh Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Skripsi UIN SUSKA Riau*, 69. <http://repository.uin-suska.ac.id/20725/>
- A Rizki Amelia AP, 1. S. (2022). Evaluasi Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). *An Idea Health Journal* , 71. <https://ihj.ideajournal.id/index.php/IHJ/article/view/94>
- Aziz, R. (2018). Dakwah Dalam Paradigma Pemberdayaan Muslim. *Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No.16*, 118-127. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/358>
- Donny Prasetyo, I. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253>
- Dr. Deden Maryani, M. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish. <http://eprints.ipdn.ac.id/5433/>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal. *Jurnal Moderat*. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3319/2914>
- Hariadi, B. (2015). Pengaruh Penerapan Softskill Mahasiswa Melalui Okk Dengan Tata Krama Kehidupan Di Kampus (Saat Perkuliahannya). *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/download/4839/4189>
- Imas Siti Jubaedah, D. K. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 361. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/20230>
- Khoirunnisa, S. A. (2022). *Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim : Kritik Atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat*. *Al-Aqdu Journal Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 8 No. 3 (2023) 323-340

- D, S, Arpah, D, Solahudin, Yuliani
Of Islamic Economic Law, 52-53. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/1991/1281>
- Nurma Mustika Hasna, N. N. (2019). *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 110. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5917>
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 20. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>
- Setiawan, A. I. (2012). *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/342>
- Siti Suciati 1, A. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak melalui Pendidikan Kesehatan. *JANITA (Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung)*, 47. <https://journal.unita.ac.id/index.php/PENGABDIAN/article/view/436>
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 20. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>
- Sururi, A. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanásalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/229>
- Setiawan, A. I. (2012). *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/342>
- Sururi, A. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanásalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/229>
- Yuliani, M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10400/1/ethesis%20skripsi%20Monika%20Yuliani.pdf>